

**METAMORFOSIS PARTAI POLITIK ISLAM MASYUMI
(STUDI TERHADAP PARTAI-PARTAI POLITIK ISLAM
DALAM PEMILU 1999)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**KHOLIL FATHUL UMAM
03370270**

PEMBIMBING:

- 1. DR. AHMAD YANI ANSHORI**
- 2. Drs. OCKTOBERRINSYAH M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
2007**

Dr. Ahmad Yani Anshori
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Kholil Fathul Umam

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Kholil Fathul Umam
NIM : 03370270
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Metamorfosis Partai Politik Islam Masyumi (Studi Terhadap Partai-Partai Politik Islam Dalam Pemilu 1999)

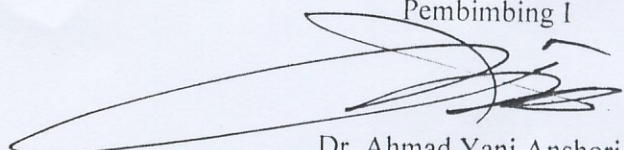
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1428 H
14 September 2007 M

Pembimbing I



Dr. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308

Drs. Ocktoherrinsyah .M.Ag
Dosen Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Kholil Fathul Umam

Kepada Yang Terhormat:
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta memberi masukan dan perbaikan-perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara:

Nama : Kholil Fathul Umam
NIM : 03370270
Jurusan : Jinayah Siyasah
Judul Skripsi : Metamorfosis Partai Politik Islam Masyumi (Studi Terhadap Partai-Partai Politik Islam Dalam Pemilu 1999)

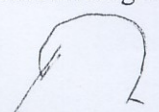
Sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Jinayah Siyasah pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1428 II
14 September 2007 M

Pembimbing II


Drs. Ocktoherrinsyah M.Ag
NIP. 150 289 435

PENGESAHAN

Skripsi berjudul

**"Metamorfosis Partai Politik Islam Masyumi (Studi Terhadap
Partai-Partai Politik Islam Dalam Pemilu 1999)"**

Yang disusun oleh :

Kholil Fathul Umam
03370270

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 17 Desember 2007 M/ 7 Dzulhijah 1428 H dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 10 Januari 2008 M
01 Hijriyah 1429 H



Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. Yudian Wahyudi, MA. Ph. D
NIP. 150 240

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Rizal Qosim, M. Si
NIP. 150256649

Sekretaris Sidang

Subaidi, S.Ag., M.Si
NIP. 150 368 335

Pembimbing I

DR. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308

Pembimbing II

Drs. Oektoberrinsyah M.Ag
NIP. 150 289 435

Penguji I

DR. Ahmad Yani Anshori
NIP. 150 276 308

Penguji II

Drs. Rizal Qosim, M. Si
NIP. 150256649

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن
محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد و على آله وأصحابه

Puji syukur dihaturkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta seluruh keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang setia.

Meskipun menulis skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan di bidang Politik Islam.

Keseluruhan penulisan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
Ketua dan Sekertaris Jurusan Jinayah Siyasah, yang telah memberi kemudahan-kemudahan administratif dalam proses penyusunan skripsi ini.

2. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori dan Bapak Drs. Ocktoherrinsyah M.Ag selaku pembimbing, yang telah banyak memberi masukan serta bantuannya dalam penyelesaian dan penyempurnaan skripsi ini.
3. Dan yang utama ungkapan hormat ta'zhim penyusun haturkan kepada bapak dan Ibunda, selaku guru sekaligus pembimbing spiritual, yang telah begitu banyak mencurahkan perhatian, pengorbanan serta kasih sayangnya.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penyusun harapkan.

Yogyakarta, 3 Ramadhan 1428 H
14 September 2007 M

Penyusun

(Kholil Fathul Umam)
03370270

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba>	b	-
ت	Ta>	t	-
ث	sa>	s\	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	-
ح	ha>	h{	h (dengan titik di bawah)
خ	kha>	kh	-
د	da>	d	-
ذ	za>	z\	z (dengan titik di atas)
ر	Ra>	r	-
ز	zai	z	-
س	sin	s	-
ش	syin	sy	-
ص	sa>d	s}	s}(dengan titik di bawah)
ض	da>d	d{	d}(dengan titik di bawah)
ط	ta>	t}	t}(dengan titik di bawah)
ظ	Za>	z}	z}(dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik

غ	gain	g	-
ف	Fa'	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wawu	w	-
ه	Ha'	h	-
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	ya'	y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasroh	i	i
—	Dammah	u	u

Contoh:

ك - kataba

ي - yazhabu

سئل - su'ila

ذكر - zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ	Fathah dan ya	ai	a dan i
وَ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف - kaifa

هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ اَ	Fathah dan alif atau alif \ Maksurah	ā	a dengan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dengan garis di atas
وَ ؤ	ḍammah dan wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qāla

- rama>

قيل - qīla

- yaqulū

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: طلحة - Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: روضة الجنة - raudḥ al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا - rabbanā

نَعَمْ - nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu " ' ". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : الرَّجُل – ar-rajulu
السَّيِّدَة – as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qomariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-)

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalalu
الْبَدِيع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh :

شَيْء - syai'un أَمَرْتُ - umirtu
أَنْ - an-nau'u تَخْضَعُ - ta'khuz'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ - Wa innallāhu lahuwa khair ar-raziqin atau

Wa innallāhu lahuwa khairur- raziqin

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ - Fa 'aufū al-kaila wa al-mizana atau

Fa 'aufūl— kaila wal – mizana

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa ma-Muhammadun illa-Rasul

- inna awwala baitin wudj'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

نصر من الله وفتح قريب - nasr minallahi wa fathun qorib
- lillahi al-amaru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

ABSTRAK

Islam merupakan agama mayoritas yang dianut oleh masyarakat Indonesia, namun dengan kemayoritasan itu tidak dibarengi dengan adanya pandangan yang sama terhadap Islam dan Politik. Dalam hal ini ada dua pandangan masyarakat Indonesia mengenai hubungan tersebut, yang pertama bahwa, Islam merupakan agama yang lengkap, yang mengatur semua sendi kehidupan, termasuk di dalamnya, mengatur hubungan dengan politik (Negara). Sedangkan pandangan kedua, bahwa Islam sebagai sebuah panduan dan kode etik dalam kehidupan bernegara, bahkan juga terdapat pemisahan total antara keduanya.

Masyumi, yang didirikan oleh hampir semua organisasi Islam, baik pasca maupun pra kemerdekaan RI, adalah sebagai partai yang berniat merealisasikan pandangan Islam dan Politik di Indonesia. Lahirnya partai ini ditujukan guna untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan umat Islam Indonesia. Setelah diproklamákannya kemerdekaan RI, tanggal 7 November 1945, diadakanlah muktamar umat Islam Indonesia di Yogyakarta, di dalam keputusannya, diambil kesepakatan bahwa diperlukannya suatu wadah untuk menampung aspirasi umat Islam dan menyalurkannya melalui wadah tersebut. Maka, partai Masyumi pun dibentuk. Besarnya partai Masyumi ternyata tidak bisa dielakkan dari perpecahan bahkan terjadi pembubaran pada tahun 1960 oleh rezim pada saat itu. Setelah bergantinya dua rezim, ternyata tidak mampu menghilangkan roh partai itu, justru sebaliknya, sisa-sisa para pegiatnya sanggup membangkitkan dan melahirkannya kembali. Namun, disayangkan persatuan para pegiatnya itu tidak ada, sehingga melahirkan beberapa bentuk partai Islam yang berbeda dari partai Masyumi atau sebagai metamorfosis partai Masyumi. Maka dari itu, skripsi ini akan mencoba menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara Masyumi dengan partai yang lahir dalam pemilu 1999 dan partai apa yang merupakan partai metamorfosis dari partai Masyumi

Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dari penyusunan ini, maka pendekatan yang digunakan adalah sosio-historis, yaitu menela'ah fenomena sosial dan partai-partai yang lahir pada pemilu 1999 dengan memaparkan perjalanan Masyumi dari awal berdirinya (1945) hingga partai ini dibubarkan (1960). Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kuantitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif

Dengan menggunakan pendekatan dan metode tersebut di atas menunjukkan bahwa, mendirikan partai Islam merupakan suatu kemaslahatan bagi umat. Sebagaimana Masyumi, pembentukan partai tersebut selain bertujuan untuk kelangsungan demokrasi, juga untuk mendapatkan keridhaan dari Allah. Demikian juga dengan partai-partai Islam yang lahir pada pemilu 1999. Dari hasil penelitian ini menunjukkan adanya kesamaan-kesamaan antara partai Masyumi dengan partai-partai Islam yang lahir pada pemilu 1999 baik dari perjuangannya, ideologinya, dasarnya, nama partainya, tanda gambarnya, maupun basis massanya, maka hal ini dapat disimpulkan bahwa adanya sebuah hubungan historis perjuangan yang tidak terputus antara partai-partai Islam 1999 seperti PBB, PMB, PPI M dan, PPP dengan partai Islam Masyumi.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAKS	xvii
DAFTAR ISI.....	x viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan Dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka.....	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Pembahasan	22

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG METAMORFOSIS PARTAI POLITIK

A. Metamorfosis.....	24
B. Partai Politik.....	24
C. Partai Politik dalam Islam	32
1. Awal dan Lahirnya Partai Politik Dalam Islam.....	32
2. Tinjauan Partai Dalam Islam	34
3. Partai Politik Islam Di Indonesia.....	38

BAB III METAMORFOSIS PARTAI MASYUMI

A. Masyumi Dan Kejatuhannya	53
1 Berdirinya Partai Masyumi	53
2 Ideologi Dan Dibubarkannya Partai Masyumi	57
B. Pembentukan Partai-Partai Islam pada Pemilu 1999.....	64
1 Latar Belakang Berdirinnya Partai-Partai Islam.....	64
2 Pergolakan Partai-Partai Islam	68
3 Profil Partai-Partai Islam.....	73
C. Partai yang merupakan Metamorfosis dari Masyumi.....	90
D. Partai yang bukan dari Metamorfosis Masyumi.....	103

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran.....	107

DAFTAR PUSTAKA	108
-----------------------------	------------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. TERJEMAHAN	I
2. BIOGRAFI TOKOH	II
4. CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berakhirnya kolonialisme barat pada pertengahan abad ke-20, negara muslim mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan antara praktek dan pemikiran politik Islam dengan negara di daerah masing-masing.¹

Hal ini disebabkan berbedanya pandangan terhadap Islam, bahwa Islam merupakan aturan yang lengkap menyeluruh dan sempurna, yang mengatur segala sendi kehidupan, mulai dari hal yang terkecil sampai dengan yang besar termasuk dalam hubungan negara, “Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan semua masalah kehidupan”,² maka timbul golongan yang menginginkan agar seluruh kerangka kehidupan yang dijalankan oleh umat Islam harus berdasarkan Islam, Islam harus dilegalkan, baik dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya dan sebagainya.

Partai politik merupakan sebuah gagasan bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dalam proses politik, maka dari itu lahirnya partai politik merupakan penghubung antara rakyat dan pemerintah. Hal ini ditempuh sebagai sarana untuk mewujudkan hak rakyat dan untuk menentukan figur-figur

¹ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek Politik Islam di Indonesia* cet. ke-1, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 2

² *Ibid.*, hlm 7

yang akan memimpinnnya kelak.³ Begitu juga dengan Islam yang merupakan aturan yang lengkap, yang berusaha untuk mewujudkan aspirasi umat Islam dalam kehidupan termasuk dalam bernegara. Partai politik pun dibentuk secara legal untuk mencapai tujuan golongan tersebut, dengan diwujudkannya tanpa adanya unsur kekerasan.⁴

Politik Islam di Indonesia yang pada periode awal diwakili oleh Masyumi, Masyumi merupakan partai Islam terbesar pasca kemerdekaan yang awal berdirinya yaitu pada akhir tahun 1943, partai ini hasil bentukan Jepang yang mewadahi perserikatan-perserikatan dan tokoh-tokoh Islam, yang telah diberi status hukum oleh militer Jepang,⁵ yang bertujuan untuk menyatukan seluruh umat Islam Indonesia untuk dapat ikut serta dalam melestarikan kolonialisme-imperialisme di Indonesia.

Hubungan antara Islam dan negara di dunia Islam bukanlah persoalan yang baru untuk diperdebatkan, sebagaimana Indonesia sejak pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, tepatnya pada Sidang Konstituante (1956-1959), dan kemudian diredamkan oleh Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959, yang selanjutnya muncul kembali setelah terlepas dari kekangan dari rezim Orde Baru, yaitu pada Sidang Tahunan MPR 2000.

³ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. Ke-4 (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 1993) hlm 159-160

⁴ Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulah dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah*, cet. Ke-3, terj. oleh Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). hlm 210

⁵ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996) hlm. 22

Dalam catatan sejarah, Masyumi yang terbentuk di Yogyakarta pada tanggal 7 sampai tanggal 8 November 1945, bukan buatan Jepang, yang mana sebagai fasilitator kependudukan Jepang.⁶ Partai Masyumi ini berbeda.⁷ Bentukannya merupakan sebuah kekecewaan dari masyarakat Islam terhadap partai-partai dan organisasi-organisasi Islam yang dirasakan tidak memadai sebagai wahana perjuangan, maka dipandang mendesak dan perlu agar umat Islam merapatkan barisan dalam satu partai politik. Terbentuknya diharapkan mampu sebagai wadah untuk menampung kepentingan dan potensi umat Islam. Dan melegalkan hubungan antara Islam dan negara di dalam pemerintahan.

Masyumi yang merupakan wadah umat Islam tersebut berkeinginan untuk menjalankan Syari'at Islam di Indonesia. Baik individu maupun dalam bernegara, niat ini dapat dilihat dari tujuan (visi-misi) Masyumi, yaitu: *“Terlaksananya ajaran dan hukum Islam di dalam kehidupan orang-seorang, masyarakat, dan Negara Republik Indonesia menuju keridho'an Ilahi”* (pasal:III),⁸

Terjunnya Masyumi dalam pemerintahan, ternyata tidak semulus seperti apa yang dibayangkan, hal ini disebabkan berbagai pergolakan yang terjadi baik dari tubuh Masyumi itu sendiri maupun dari luar, sebagaimana situasi politik Indonesia pada saat itu, banyak sekali yang perlu untuk dibenahi dengan serius. Apalagi melihat tujuan dari partai ini merupakan hal yang sangat *sensitive* bagi pemeluk agama di luar Islam, selain itu juga, partai ini berhadapan langsung

⁶ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik.*, hlm. 30

⁷ Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) baik adanya kesamaan nama maupun keberadaan unit-unit yang ditinggalkan oleh Masyumi sebelumnya bukan kendala bagi partai ini.

⁸ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, cet. ke-1, (Jakarta: Grafiti Perss, 1987). hlm 493

dengan partai-partai lain yang mempunyai tujuan dan misi yang sangat berbeda bahkan bertentangan. Hal ini terlihat dari perdebatan sengit yang terjadi di sidang konstitusi mengenai Piagam Jakarta dan Dasar Negara, akibatnya situasi pemerintah dalam keadaan tidak stabil, ditambah lagi pemberontakan yang terjadi di daerah-daerah Indonesia. Melihat situasi yang boleh dikatakan kacau, Soekarno sebagai Presiden saat itu mengambil alih Mandat dari Kabinet Ali, Presiden pun mengeluarkan dekrit sebagai suatu solusi yang menyoal untuk kembali ke UUD 45 dan membubarkan dewan konstituante, dan membentuk sistem Demokrasi Terpimpin dari sistem Parlementer, hal ini jelas menimbulkan berbagai kritikan keras dari tokoh-tokoh partai Islam, khususnya Masyumi, yang menyatakan bahwa ini adalah sebagai sistem pemerintah antidemokrasi.⁹

Ketegangan antara dua kubu ini mereda setelah Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden NO, 200/1960, pada tanggal 17 Agustus 1960, yang isinya tentang pelarangan keberadaan Partai Masyumi dan PSI di perpolitikan Indonesia, bahkan Masyumi sendiri dikait-kaitkan dalam pemberontakan PRRI pada tahun 1958.¹⁰

Setelah kekuatan partai politik Islam Masyumi lenyap, pemerintah menyisakan tiga kekuatan yang masih bercokol di dalam pemerintahan, Soekarno, PKI dan TNI AD. Sedangkan partai Islam lain seperti PSII NU, Perti, yang dibiarkan pemerintah untuk tetap ada pada saat itu, tidak memiliki pengaruh

⁹ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam Politik Pasca-Soeharto*, cet. ke-1 (Jakarta :Pustaka LP3ES, 2003), hlm 43.

¹⁰ Syafi'i Ma'arif, *Islam Dan Politik*., hlm 70-75.

berarti terhadap pemerintahan bahkan bisa dikatakan mereka (partai-partai Islam) tidak mempunyai kekuatan dan keberanian seperti halnya Masyumi.¹¹

Arus perebutan kekuasaan pun tidak terelakkan diantara ketiga kekuatan itu (Soekarno, PKI dan, TNI AD) menyebabkan terabainya persoalan-persoalan politik, ekonomi dan sosial, hingga berujung pada runtuhnya rezim Soekarno, dan lenyapnya keberadaan PKI,¹² lenyapnya PKI ini juga merupakan akibat dari ulah mereka sendiri karena melakukan kudeta pada tanggal 30 September 1965, sedangkan TNI AD sebagai pemenang dalam perebutan kekuasaan tersebut, dengan sigap membangun sebuah rezim baru, yaitu Orde Baru, sebuah pemerintahan militer yang dipegang oleh Presiden Soeharto.¹³ Pada Orde Baru ini kekuatan-keuatan partai Islam benar-benar tumpul dibuatnya, ini diakibatkan strategi pemerintah yang diantaranya, mensejajarkan politik Islam dengan komunisme, komunisme sebagai ekstrim kiri dan politik Islam sebagai ekstrim kanan, yang sama-sama dianggap akan membahayakan negara dan akan merebut kekuasaan. Strategi ini benar-benar efektif, mengakibatkan kekuatan politik Islam dicap sebagai kekuatan politik yang sangat menakutkan dan membahayakan serta harus dihindari.

Di sisi lain, sisa-sisa kekuatan politik Islam yang masih ada tidak berhenti disitu (pegiat dan simpatisan Masyumi), mereka berusaha untuk memperbaiki

¹¹ *Ibid*, hlm. 39-41

¹² Keberadaan PKI kuat ketika ia dekat dengan Presiden Soekarno, namun ketika Soekarno mulai melemah PKI-pun mengalami nasib yang sama. Kesempatan itu yang diambil TNI untuk melenyapkan PKI.

¹³ Dikutip oleh Zainal Abidin Amir, "*ICMI dan Masa Depan Politik Islam di Indonesia*," dalam Nasrullah Ali Fauzi (Penyunting), *ICMI: Antara Status Quo dan Demokratisasi*, (Bandung: Mizan, 1995), hlm. 201.

citra politik Islam, dengan berusaha masuk ke pemerintah. Berkat kegigihan perjuangan mereka, pada tanggal 20 Februari 1968, berdirilah partai Islam baru, Partai Muslim Indonesia (Parmusi).¹⁴ Namun, kekhawatiran negara timbul, ketika melihat bekas tokoh-tokoh penting Masyumi (sebagai partai terlarang) berada dibalik pembinaan partai tersebut. Sehingga, pemerintah tidak leluasa membiarkan Parmusi bebas mengendalikan partainya sendiri, tanpa adanya campur tangan dari pemerintah.

Pada pemilu 1971, Golkar sebagai partai pemerintah berhasil merebut banyak suara dan memenangkan pemilu, sekaligus memilih kembali Soeharto sebagai Presiden. Kekuasaan yang dipegang penuh oleh Orde Baru, melahirkan keputusan MPR, yang isinya bahwa pemilu Orde Baru selanjutnya harus diikuti oleh tiga partai. Keputusan yang dikeluarkan MPR ternyata memberikan dampak yang begitu buruk bagi partai-partai Islam, seperti NU, Parmusi, PSII dan Perti. Karena partai-partai Islam tersebut, yang pada dasarnya banyak terdapat perbedaan, oleh pemerintah dileburkan menjadi satu partai.

Melalui negoisasi yang panjang akhirnya partai-partai Islam membentuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keadaan tetap tidak berubah, kekakangan pemerintah tetap menjadi kendala terbesar dan menjadi penyebab utama sulitnya merealisasikan tujuan partai.

Runtuhnya Orde Baru pada tanggal 28 Mei 1998, yang ditandai dengan berbagai aksi dan persoalan politik, ekonomi dan, sosial, yang menempatkan posisi Presiden Soeharto untuk turun dari jabatan, sedangkan Habibie sebagai

¹⁴ Zainal Abidin Amir, *Peta Islam*., hlm. 47

wakil Presiden naik untuk menggantikannya. Hal ini ternyata menghembuskan angin segar bagi kekuatan-kekuatan politik Islam selanjutnya, lewat keputusan-keputusan penting yang diambil Presiden Habibie, partai-partai Islam kembali menjadi kekuatan yang berani dan siap tampil di pentas nasional tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, keputusan itu diantaranya:

1. Membebaskan tahanan politik dan Narapidana Politik.
2. Menggusur P4 dari wacana politik nasional.
3. Menghapus pengharusan memakai asas Tunggal Pancasila bagi organisasi massa dan organisasi politik.
4. Mengeluarkan Otonomi Daerah.
5. Memberikan kebebasan untuk mendirikan partai politik bagi seluruh masyarakat dan komitmen untuk menyelenggarakan pemilu pada bulan juni 1999. Karena pada pemilu 1997 dianggap tidak *valid*, maka dikeluarkan UU Pemilu 1998 yang bermaksud untuk mempercepat pelaksanaan Pemilu 1999.¹⁵

Berangkat dari situ partai politik Islam pun lahir dan bermunculan secara bebas guna bersaing pada pemilu tahun 1999, yang dengan siap menampilkan Islam sebagai asas, ideologi, dan tujuan partai, yang selama ini dikekang oleh pemerintah. Demikian juga bagi partai politik Islam Masyumi yang merupakan kajian dari penulisan ini, yang telah melewati perjalanan begitu panjang dan suram, sebagai catatan bahwa pada tahun 1960 Masyumi dibubarkan dan tahun 1968 tokoh-tokohnya di Parmusi dicoret dari kepengurusan partai oleh pemerintah

¹⁵ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam di Indonesia*, cet ke-1 (Jakarta: Pustaka Pelajar 2006), hlm. 137

yang selanjutnya tahun 1973 digabungkan menjadi satu partai, yaitu PPP, yang mau tidak mau harus berhadapan langsung dengan campur tangan pemerintah dan gesekan-gesekan dari internal partai itu sendiri.

Dari keadaan inilah, maka penyusun ingin menggali dan mencari serta menganalisis hubungan partai-partai politik Islam yang lahir setelah Orde Baru runtuh atau tepatnya dalam pemilu 1999 dengan partai politik Islam Masyumi.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan menjadi dua pokok permasalahan yang ingin dikaji, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Partai-Partai Politik Islam yang lahir pada Pemilu 1999, masih memiliki hubungan keterkaitan dengan Partai Politik Islam Masyumi?
2. Partai apa sajakah yang merupakan bentuk baru atau metamorfosis dari partai Masyumi?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk memperoleh kejelasan tentang apakah partai-partai Islam dalam pemilu 1999, memiliki keterkaitan dengan partai Masyumi.
- b. Memperoleh kejelasan tentang kelahiran partai-partai Islam pada pemilu 1999.

2. Kegunaan penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi khasanah politik Islam Indonesia khususnya dalam bidang kepartaian
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia Islam dalam pendewasaan berpolitik.

D. Tela'ah Pustaka.

Dari berbagai penelitian yang telah ada, bahwa belum ada penyusun lain yang telah membahas penelitian tentang, Metamorfosis Partai Masyumi (Studi Terhadap Partai-Partai Islam Dalam Pemilu 1999). Namun, tidak sedikit literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan masalah ini diantaranya, adalah:

Deliar Noer, dalam bukunya yang berjudul *Partai Islam Di Pentas Nasional*,¹⁶ yang membahas tentang kisah dan analisis yang berkaitan dengan perkembangan politik Islam Indonesia pada tahun 1945-1965, terutama partai politik Islam dalam lintasan sejarah, beliau mendeskripsikan bagaimana suasana pemilu 1955, yang melibatkan banyak partai, buku ini juga mengetengahkan bagaimana kinerja partai-partai Islam awal seperti, MASYUMI, PSII, NU, PERTI, dalam melintasi zaman revolusi kemerdekaan, demokrasi Parlemen dan demokrasi Terpimpin. Idris Thoha, yang menjadi editor dalam bukunya, *Pergulatan Partai Politik Indonesia*,¹⁷ dalam buku ini menjelaskan dan mengumpulkan data-data penting tentang kinerja-kinerja partai politik menjelang pemilu 2004. Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan*

¹⁶ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, cet ke-1, (Jakarta: Grafiti Perss, 1987).

¹⁷ Idris Thoha (ed), *Pergulatan Partai Politik Indonesia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004)

Partai-Partai di Indonesia,¹⁸ dalam buku ini beliau menyampaikan dan mengumpulkan tentang partai Islam sejak awal pergerakan Islam, yang berubah dan berani memberikan pengaruh terhadap kebijakan pemerintah dengan membentuk sebuah Partai Islam dan surutnya pengaruh yang diberikan kepada pemerintahan setelah kekuasaan di pegang Orde Baru, kembali bangkit setelah reformasi, dan kembali memberikan pengaruh kebijakan terhadap pemerintah awal 2000, khususnya berkaitan Sidang Tahunan MPR 2000. Karangan Bambang Cipto dalam bukunya, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*,¹⁹ memperjelas tentang persoalan-persoalan mendasar yang muncul setelah Proyek Multipartai, yang dicanangkan pemerintah transisional presiden Habibie, persepsi masyarakat dan persoalan-persoalan yang berkaitan tentang koalisi partai yang selama ini telah hilang dan ingin tumbuh kembang kembali, buku ini juga membahas tentang bagaimana mekanisme yang dilakukan multipartai dalam menangani masalah-masalah yang ada di dalam pemerintah. Ahmad Suhelmi dalam bukunya, *Polemik Negara Islam "Soekarno Versus Natsir"*.²⁰ Buku ini memaparkan tentang pertarungan ideologi Islam dan Nasionalis Sekuler yang mana ini merupakan ideologi yang dibangun Natsir mewakili Masyumi dan Soekarno sebagai Presiden. Ideologi-ideologi ini masih tetap ada dan terus mendapat tempat dari tokoh-tokoh di Indonesia sampai sekarang. Arisandi, dalam Skripsinya yang berjudul

¹⁸ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia*, cet. ke-1 (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006)

¹⁹ Bambang Cipto, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)

²⁰ Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam "Soekarno Versus Natsir"*, cet. Ke-1 (Jakarta: Teraju, 2002)

"Kegagalan Politik Islam (tela'ah terhadap Partai Politik Masyumi),"²¹ dalam skripsinya ini, dijelaskan mengenai kegagalan Partai Masyumi 1945 dalam memenangkan pemilu dan merealisasikan tujuan Partai. Selain itu juga skripsi-skripsi yang berkaitan dengan masalah tersebut, seperti: M. Ridwan, *Sikap partai Politik Masyumi Pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960)*.²² Ahmad Affifudin, *Sistem Pemerintahan dalam Pandangan Bulan Bintang*.²³

Selain itu juga banyak lagi buku-buku yang berkaitan tentang partai politik Masyumi yang kesemuanya itu membahas tentang politik Islam Indonesia dan Masyumi, namun dari sekian buku yang dilacak penyusun, belum ada yang spesifik memberikan sumbangan yang berkaitan tentang Metamorfosis Partai Masyumi, karena itu penyusun berusaha untuk menjelaskan dan mengkaji tentang partai-partai Islam pada pemilu 1999 yang memiliki hubungan dan merupakan penjelmaan atau bentuk baru dari Partai Politik Islam Masyumi.

Dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pengetahuan bagi kita semua tentang partai-partai politik Islam awal yang lahir setelah runtuhnya rezim Soeharto. Maka dari itu penyusun mengangkat skripsi ini dengan judul: **Metamorfosis Partai Politik Islam Masyumi (Studi Terhadap Partai-Politik Islam Dalam Pemilu 1999)**.

²¹ Arisandi, *Kegagalan Politik Islam (tela'ah terhadap Partai Politik Masyumi)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2004).

²² M. Ridwan, *Sikap partai Politik Masyumi Pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960)*), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2001).

²³ Ahmad Affifudin, *Sistem Pemerintahan dalam Pandangan Bulan Bintang*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2002).

E. Kerangka Teoritik

Kajian ini merupakan kajian *siy sah dust riyyah*, yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan tata negara, baik mengenai dasar negara, bentuk negara maupun hak-hak dan kewajiban warga negara.²⁴ Karena kajian ini kajian *siy sah dust riyyah* maka ia tidak lepas dari tujuan dasar *siy sah syar'iayyah* - sebagaimana tujuan *maq sid al-syari'ah*- adalah untuk terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat luas, yaitu dalam hal hak dan kewajiban sebagai warga negara. Menurut al-Maududi hak-hak tersebut adalah kebebasan berkumpul, dengan syarat hak atau kebebasan ini digunakan untuk kebaikan dan kebenaran, serta tidak menjadi sebab pecahnya pertengkaran diantaranya atau tumbuhnya perselisihan-perselisihan mendasar.²⁵ Sedangkan kewajiban dari pembentukan sebuah perkumpulan atau partai, menurut Yusuf al-Qadhawi yaitu sebagai formula khusus untuk melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar*, dan untuk meluruskan penyimpangan pemerintahan tanpa penumpahan darah.²⁶

Mendirikan sebuah partai politik merupakan sebuah keharusan dalam kehidupan modern yang demokratis.²⁷ Dalam hal ini, agar berjalannya sebuah

²⁴ Selain *Siy sah Dust riyyah*, juga terdapat *Khar jiyyah* (hubungan Internasional), yang meliputi hubungan antar negara, kaidah-kaidah yang melandasi hubungan ini dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai. *Siy sah M liyah* (harta), meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara. Kesemuanya terangkum dalam *Siy sah syar'iayyah*. Lihat *Ensiklopedi Hukum Islam*, diedit oleh Abdul Aziz Dahlandkk, V (Jakarta: Ichtiar Baru Van House, 1996), 1267. Artikel "Siy sah Syar'iayyah".

²⁵ Abu A'la al-Maududi, *Khilafah dan Kerajaan*, cet. Ke-1 (Bandung: Mizan, 1984) hlm. 78.

²⁶ Al-Qardhawy, Yusuf, *Fiqh Daulauh dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, terj. oleh Kathur Suhardi, cet. ke-3, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998). hlm. 210.

²⁷ Ichsanul Amal," Pengantar" dalam Ichsanul Amal (ed), *Teori-Teori Mutakhir partai Politik*, edisi revisi cet. ke-2 (Yogyakarta:PT Tiara 1993) .hlm. xv

pemerintahan yang demokratis ada empat tahapan yang bisa dijadikan acuan. Tahapannya yaitu sebagai berikut:

Pertama, tahapan transisi, dalam tahapan ini terjadi kombinasi diantara beberapa hal, yaitu: kritisisme dan perlawanan dari luar rezim; rezim mengalami perpecahan internal; angkatan bersenjata mengalami perpecahan atau perubahan orientasi politik; rezim mengalami krisis ekonomi atau politik semakin sulit dikelola; dan tuntutan-tuntutan perubahan semakin kuat.

Kedua, tahapan liberalisasi awal, dalam tahapan ini yang terjadi adalah jatuhnya atau berubahnya rezim lama; meluasnya hak-hak politik rakyat; terjadi ketidaktaatan pemerintah; terbentuknya ketidakpastian dalam banyak hal; terjadinya ledakan partisipasi politik, diantaranya dilaksanakan pemilihan umum yang demokratis dan pergantian pemerintahan sebagai konsekuensi dari pemilihan umum.

Ketiga, tahapan transisi, dalam tahap ini berlangsung dengan telah adanya pemerintahan pemimpin baru yang bekerja dengan legitimasi yang baru. Dan tahapan keempat adalah konsolidasi demokrasi. Tahap ini membutuhkan waktu yang lama karena harus menghasilkan perubahan yang ditandai dengan telah terlihatnya paradigma (berpikir), pola perilaku, tabiat dan kebudayaan dalam masyarakat.²⁸

Berdirinya partai politik Islam, merupakan hak-hak politik rakyat yang dalam hal ini berkaitan dengan tahapan kedua, yaitu liberalisasi awal. Menurut

²⁸ Eep Saifullah Fatah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokrasi Pasca Orde Baru*, cet ke-1 (Bandung:Mizan, 2000), hlm. 241.

Lili romli, tumbuh dan bangkitnya partai-partai politik Islam ini dipengaruhi oleh waktu dan lingkungan yang bersifat: ²⁹

1. Teologis. Dalam hubungan antara agama dan negara, Islam memiliki pendapat yang belum terselesaikan, karena dalam al-Qur'an sendiri tidak menjelaskan secara eksplisit tentang hubungan keduanya, ia hanya menjelaskan secara global dan garis-garis besar sebagai pedoman, seperti perlunya menegakkan keadilan, persamaan, musyawarah dan, toleransi. Oleh karena itu, banyak menimbulkan berbagai penafsiran tentang masalah-masalah hubungan tersebut. Ada tiga pendapat tentang hubungan itu. (1) bersifat *Integrated*; (2) mutualisme-simbiosis; dan (3) sekuleristik.³⁰
2. Sosiologis, Islam di Indonesia merupakan agama mayoritas, dengan keadaan tersebut sudah sepantasnya partai politik Islam didirikan sebagai tempat penyaluran aspirasi politik sesuai dengan nilai-nilai perjuangan Islam. Faktor ini memiliki dua perbedaan pendapat dalam memandang hubungan Islam dan negara, pada awalnya hubungan ini bersifat *integrated*, kemudian pada perkembangan selanjutnya terjadi sebuah pergeseran yaitu substansialistik, Islam cukup sebagai panduan dalam kehidupan bernegara.

²⁹ Lili Romli, *Islam Yes Partai Islam Yes.*, hlm 20

³⁰ Sekuleristik ini mengacu pada terminologi Greetz, bahwa Islam di Indonesia terbagi dua komunitas, abangan dan santri. Kedua komunitas ini memiliki pendapat yang berbeda dalam hubungan tersebut. Sekuleristik ini merupakan pendapat yang dimiliki oleh komunitas abangan, bahwa Islam dipisahkan dengan negara sedangkan *integrated* pada komunitas santri bahwa Islam mengatur seluruh sendi-sendi kehidupan termasuk negara. Lihat Clifford Greetz, *Santri, Abangan Dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, cet. Ke-1 (Jakarta: Pustaka Jaya, 1981), hlm 8

3. Historis. Dalam sejarah Indonesia, Islam merupakan kekuatan yang sangat besar dalam peranannya melawan penjajah. Hal ini terlihat pada organisasi Islam seperti SI, sedangkan setelah kemerdekaan terbentuk beberapa partai-partai Islam seperti Masyumi, PSII, NU dan, Perti. Walau periodenya berbeda, namun kesemuanya memiliki tujuan yang sama untuk menjadikan Indonesia lebih baik
4. Reformasi, di masa ini setiap kelompok atau golongan diberi kesempatan untuk menyalurkan atau membentuk partai politik sesuai dengan asas, aspirasi yang dimiliki, termasuk juga ideologi. Berkaitan dengan ideologi, ini dapat dibagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok tradisionalis; kelompok modernis; kelompok fundamentalis.
 - a. Kelompok tradisionalis. Kelompok ini mengacu kepada aliran Islam tradisionalis. Yang dimaksud dengan Islam tradisionalis adalah penganut Islam yang masih terikat kuat dengan pikiran ulama ahli fiqh, hadist tafsir, tauhid dan tasawuf yang hidup antara abad ke-7 sampai dengan abad ke-13. Di Indonesia, Islam tradisionalis ini mengidentifikasikan dirinya sebagai kalangan Islam menganut faham *Ahlussunah wal jamaah*. Pemikiran dan praktek Islam tradisionalis menganut faham mazhab Syafi'i, sehingga memiliki kemampuan untuk tampil dalam segala situasi secara luwes, fleksibel, dan akomodatif, serta tidak terpaku pada keputusan masa lalu dalam merumuskan sikapnya. Dengan berlandaskan pada pendekatan fiqh memungkinkan adanya pilihan untuk menyesuaikannya dengan

konteks waktu. Tentu saja penyesuaian itu dilandasi oleh konsensus (Ijma') di kalangan para ulama.

- b. Kelompok Modernis, modernisme Islam merupakan suatu gerakan pemikiran dunia Islam yang muncul menjelang abad 20. Gerakan ini muncul sebagai perlawanan terhadap doktrin dan praktek-prektek keagamaan yang dianggap menyimpang dari nilai-nilai ajaran Islam. Karena itu gerakan ini sangat menentang praktek *bid'ah* dan *khufarat*. Karena praktek semacam ini tidak terdapat dalam Qur'an dan Hadis. Kembali ke al-Qur'an dan Hadis merupakan tujuan gerakan ini. Modernisme Islam juga menyerukan bahwa pintu ijtihad masih terbuka. Menurut Natsir, modernis Islam adalah suatu sikap dan pandangan untuk menerapkan ajaran dan nilai kerohanian, sosial politik Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an dan Sunnah Nabi sebagai ajaran tauhid dan menyesuaikan dengan perkembangan mutakhir dalam sejarah peradaban manusia.³¹ Sedangkan menurut Yusril Ihza Mahendra, kelompok modernis dalam menafsirkan al-Qur'an dan Sunnah Nabi kecendrungan bersifat elastis dan fleksibel. Seperti halnya dalam (1) segi masalah-masalah mu'amalah, hanya memberikan ketentuan-ketentuan yang umum yang bersifat universal; (2) dalam bidang *ijtihad* harus ditegakkan. Ijtihad memungkinkan corak pengaturan doktrin yang berisi ketentuan-ketentuan umum dalam al-Qur'an dan hadis dapat diimplementasikan ke dalam suasana

³¹ Anwar Harjono, M. Natsir: *Sumbangan Dan Pemikiran Untuk Indonesia*, cet.5, (Jakarta: Media Dakwah, 1995) hlm 45

konkrit, yaitu suasana masyarakat yang ada pada zaman dan tempat tertentu; (3) modernisme memandang tradisi awal Islam yang dicontohkan Nabi dan para sahabat hanyalah mengikat pada prinsip-prinsipnya saja, bukan menyangkut hal-hal yang terperinci; (4) modernis memandang *ijma'* yang dicapai oleh generasi terdahulu dapat diperbaharui oleh generasi yang hidup di zaman kemudian; (5) modernis memandang pluralisme suatu yang positif. Selama dunia ini ada selama itu pula pluralisme masih akan tetap ada. Kaum muslim merupakan penengah antara kecenderungan-kecenderungan ekstrim yang terdapat pada umat-umat yang lain; dan (7) modernisme cenderung bersikap terbuka dan toleran.³²

- c. Fundamentalisme, Jan Hjafe mengartikan fundamentalisme sebagai keyakinan kepada al-Qur'an dan Sunnah sebagai otoritas yang mengandung norma-norma politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan untuk menciptakan masyarakat yang baru. Sementara Binder, fundamentalisme adalah aliran yang bercorak romantisme kepada Islam awal. Mereka berkeyakinan bahwa doktrin Islam adalah lengkap, sempurna dan mencakup segala persoalan.³³ Sedangkan menurut Yusril, fundamentalisme adalah sebagai ideologi politik sama dengan modernisme dalam hal landasan doktrinnya, yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Keduanya sama untuk membangun suatu tatanan masyarakat

³² Yusril Ihza Mahendra, *Modernis Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam , Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) Dan Partai Jam'A'at-I-Isl'Ami (Pakistan)*, terj. Mun'im A. Sirry, cet 1 (Jakarta, Paramadina, 1999) hlm 29-31.

³³ *Ibid.*, hlm. 17.

Islam, sesuai dengan doktrin yang termaktub dalam al-Qur'an dan Sunnah nabi. Perbedaannya terletak pada penafsirannya. Apabila modernisme cenderung menafsirkan doktrin secara *elastis* dan *fleksibel*, sementara fundamentalisme cenderung menafsirkan secara *rigid* dan *literalis*.³⁴ Dengan penafsiran yang sedemikian maka kelompok ini mempunyai pandangan dengan bahwa corak pengaturan doktrin bersifat total dan serba mencakup. Sehingga dalam kehidupan di dunia ini tidak ada yang luput dari doktrin. Berdasarkan hal itu maka kaum fundamentalis melihat (1) *ijtihad* dengan sendirinya dibatasi hanya kepada masalah-masalah di mana doktrin tidak memberikan petunjuk dan pengaturan sampai detail-detail persoalan; (2) preseden zaman awal Islam adalah mengikat secara keseluruhan; (3) *ijma'* sahabat Nabi adalah mengikat generasi-generasi kaum muslim hingga akhir zaman. Dengan demikian *ijma'* tidak bisa dirubah oleh generasi mendatang.; (4) kaum fundamentalisme cenderung memandang negatif dan pesimis kepada pluralisme. Masyarakat dilihat secara “hitam putih”, yaitu antara masyarakat Islami yang menyakini dan mengamalkan doktrin secara *kaffah* dengan masyarakat yang tidak menyakini dengan mengamalkannya.³⁵

Mengenai pengelompokan partai Islam, seperti yang disampaikan Azumardi Azra, bahwa partai politik Islam dapat dibagi dalam beberapa kriteria,

³⁴ *Ibid.*, hlm. 29.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 32.

pertama, mencantumkan Islam dalam asas partai. Kedua, menggunakan simbol-simbol yang identik atau secara dekat diasosiasikan dengan Islam seperti bulan bintang, ka'bah, atau kalimat tulisan arab. Ketiga, memiliki basis sosial utama dari kalangan Islam tertentu.

E. Metode Penelitian.

Untuk mencapai hasil penelitian yang optimal, sistematis, metodis dan juga secara moral dapat dipertanggungjawabkan, sebuah penelitian atau penulisan haruslah memiliki metode tertentu, yang meliputi jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, dan analisa data.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan Studi Pustaka (*Library Research*),³⁶ dengan tujuan mengumpulkan data dan informasi data informasi tentang Metamorfosis Partai Politik Masyumi, Studi Terhadap Partai-Partai Islam Dalam Pemilu 1999 melalui bahan-bahan material yang terdapat di perpustakaan. Data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara komprehensif guna mencari titik terang dari pokok masalah.

2. Sifat penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis,³⁷ yaitu dengan menjelaskan permasalahan dengan cara mendeskripsikan tentang Metamorfosis Partai Politik

³⁶ *Library Research* yaitu suatu penelitian yang bersumber datanya diperoleh melalui sumber-sumber kepustakaan baik dari buku, majalah, surat kabar, maupun karya ilmiah lain yang relevan dengan obyek pembahasan. Dengan artian menjadikan pustaka sebagai landasan suber utama

³⁷ Lexi. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Rosida Karya, Cet 17, 2002), hlm. 198

Masyumi, Studi Terhadap Partai-Partai Islam Dalam Pemilu 1999 yang mempunyai dimensi ruang dan waktu. Yang kemudian dianalisis dengan literatur yang ada. Sehingga diharapkan mendapat kesimpulan akhir dari skripsi ini.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosio-historis, yaitu proses terus menerus, kritis dan terorganisir untuk menganalisa dan memberikan interpretasi dalam fenomena sosial yang mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Sedangkan historis yaitu membuat rekonstruksi secara sistematis dan objektif dari kajian atau peristiwa di masa lalu dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasikan dan mensintesis data menuju fakta dengan kesimpulan yang kuat. Dalam hal ini dibahas tentang bentuk baru atau metamorfosis dari partai Islam Masyumi menjadi partai-partai Islam yang lahir pada pemilu 1999.

4. Pengumpulan data

Penelitian pustaka, maka teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dengan jalan mengambil data-data dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penyusun.

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data yang berkaitan langsung dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Sumber data primer ini dapat berupa berupa buku yang berkaitan dengan kajian penyusunan skripsi ini. Buku pokok tersebut yaitu, Lili Romli, yang berjudul Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia.

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data yang berupa buku atau skripsi langsung maupun tidak langsung yang ada relevansinya dengan pokok permasalahan yang sedang dibahas. Diantaranya buku karya Zainal Abidin Amir, yang berjudul Peta Politik Islam Pasca-Soeharto, Rusli Karim dengan berjudul Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut, dan juga Deliar Noer dengan dua bukunya yang berjudul Partai Islam di Pentas Nasional dan Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942 serta karya-karya penulis lainnya.

5. Analisis Data

Sebagaimana data yang terkumpul pada pengumpulan data di atas kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pengetahuan yang bersifat umum, yang berangkat dari pertumbuhan partai politik Islam pada umumnya kemudian dijelaskan dalam kerangka yang bersifat khusus. Yaitu mengenai kategori partai metamorfosis partai Islam Masyumi.
- b. Induktif, yaitu mengumpulkan data yang bersangkutan dari fakta-fakta khusus yang kemudian dari fakta-fakta tersebut ditarik generalisasi yang bersifat umum. Dalam hal ini penyusun berangkat dari partai politik Islam Masyumi dikaitkan ke dalam fakta yang bersifat umum yaitu dalam partai-partai Islam pada era reformasi atau dalam pemilu 1999.

G. Sistematika Pembahasan.

Agar pembahasan ini memiliki logika yang sistematis, maka pembahasan dalam penelitian ini menggunakan susunan sebagai berikut :

Bab pertama: merupakan pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada latar belakang masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab selanjutnya merupakan tinjauan umum dari skripsi ini, yaitu memberikan gambaran tentang metamorfosis partai politik, yang di dalamnya dibahas tentang sejarah dan pengertiannya baik dari pandangan barat maupun dari Islam. Sedangkan pembahasan terakhir dari bab ini tentang partai politik Islam di Indonesia, dari pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan sampai pada tumbangnya orde baru.

Bab yang ketiga ini, memuat tentang perjalanan partai politik Masyumi dipentas nasional, selanjutnya tentang latar belakang berdirinya partai-partai Islam dalam pemilu 1999, profil singkat dari partai-partai Islam pemilu 1999, selanjutnya memberikan klasifikasi partai-partai Islam pada pemilu 1999 yang merupakan metamorfosis Masyumi dan yang bukan metamorfosis dari Masyumi

Untuk mengetahui kesimpulan akhir dari penulisan skripsi ini, penyusun menyajikan bab empat yang sekaligus merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut di masa mendatang tentang eksistensi perjuangan baik berupa partai ataupun gerakan-gerakan yang berupaya untuk menjadikan Indonesia menjadi lebih baik.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Masyumi yang telah dibubarkan oleh Soekarno pada tahun 1960, menyisakan pengalaman pahit terhadap perjuangan dan aspirasi umat Islam Indonesia, sebagaimana perjuangan-perjuangan Masyumi dahulu yang dinilai mewakili seluruh kepentingan umat Islam dan menjadi satu-satunya wadah untuk aspirasi umat Indonesia, kebesaran Masyumi dapat dilihat dari keberhasilannya dalam menampung seluruh kepentingan umat Islam dan menyatukan organisasi-organisasi umat Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persis, Persatuan Umat Islam, Al Irsyad, Jami'iyatul Wasliayah, Al Ittihadiah dan Persatuan Seluruh Aceh (PUSA) walaupun pada akhirnya sebagian organisasi-organisasi Islam keluar dan membentuk partai-partai sendiri.

Bubarnya Masyumi, dan berlanjut pada Orde Baru, selain meninggalkan sejarah perjuangan umat Islam yang panjang, Masyumi juga memberikan pengaruh yang besar terhadap perkembangan Islam di Indonesia seperti perkembangan pada bidang dakwah terutama dalam bidang politik. Pada bidang dakwah tokoh-tokoh Masyumi banyak yang aktivis di situ khususnya dalam pembentukan DDII (Dewan Dakwah Islam Indonesia) seperti Natsir, Syafrudin Prawiranegara, Anwar Harjono dan lain-lain. Sedangkan dalam bidang politik para pegiat Masyumi berhasil melahirkan Parmusi (Partai Muslim Indonesia) dan politisi-politisi yang aktif dalam tubuh Golkar. Hal ini berlanjut sampai era reformasi khususnya pada pemilu 1999.

Di bidang politik, perkembangan partai politik 1999 ternyata banyak dilahirkan atau ditumbuhkan oleh sisa-sisa para pegiat dan pendukung Masyumi dengan membawa darah perjuangan Masyumi, ini dapat dilihat dari dasarnya, ideologinya, platformnya, figurnya, basis massanya, tujuannya, namanya, tanda gambar partainya demikian juga dalam perjuangannya yang ingin memformalkan Syari'at Islam di Indonesia. Sebagai contoh, ketika pada sidang Tahunan MPR tahun 2000, partai-partai pemilu 1999 bergerak dan konsisten dalam perjuangannya untuk memformalkan Syari'at Islam yang terkandung di dalam Piagam Jakarta, sebagaimana Masyumi dulu yang berusaha sekuat tenaga untuk memperjuangkan Piagam Jakarta bersama partai-partai Islam lain.

Perjuangan ini terwakili oleh PBB dan PPP yang merupakan dua dari partai metamorfosis Masyumi, kedua partai itu menggagas tentang pemberlakuan Piagam Jakarta kembali tepatnya pada Sidang Tahunan 2000 bersama. Gagasan ini ternyata mendapat dukungan dari partai-partai Islam lain seperti PK, PKU, PUI, PSII 1905 dan PPI Masyumi yang tergabung di dalam FPI (Forum Partai Islam). Adapun alasan PBB mengusulkan dan memperjuangkan Piagam Jakarta. *Pertama*, merupakan konsekuensi dari wujud pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, *Kedua* merupakan solusi untuk memecahkan menurunnya moral bangsa, *Ketiga*, pemberlakuan Syari'at Islam hanya untuk umat Islam, *Keempat*, pemerlakuannya tidak akan memarginalkan agama lain.

Berdasarkan paparan tersebut, dapat diambil pemahaman bahwa perjuangan Masyumi masih berlanjut khususnya dalam perjuangan untuk

memformalkan Syari'at Islam, yang terkandung di dalam Piagam Jakarta. Namun terjadi kegagalan seperti pada era sebelumnya,

Perjalanan perjuangan Masyumi yang begitu panjang ternyata mempengaruhi orientasi perjuangan awalnya selain memformalkan Syari'at Islam juga membentuk Negara Islam, ini terlihat sebagaimana PBB dan PPP yang merupakan partai metamorfosis Masyumi dan partai-partai Islam lain yang orientasi perjuangannya hanya ingin memformalkan Syari'at Islam dan tidak satupun dari mereka yang mengusung atau menggagas tentang Negara Islam seperti halnya partai Masyumi dulu.

Beberapa partai yang dikategorikan sebagai partai metamorfosis dari partai Masyumi adalah PBB (Partai Bulan Bintang), PMB (Partai Masyumi Baru), PPI M (Partai Politik Islam Indonesia Masyumi) dan, PPP (Partai Persatuan Pembangunan).

Dari sini dapat diambil sebagai catatan penting.

1. Bahwa partai Masyumi merupakan inspirasi penting pembentukan partai Islam dalam pemilu 1999, bahkan pembentukan partai-partai politik Islam kedepannya.
2. Perjuangan Masyumi dan umat Islam sejak awal kemerdekaan sampai pemilu 1999 masih eksis dalam perpolitikan Indonesia bahkan pada pemilu 2009.
3. Adanya beberapa Metamorfosis partai Masyumi merupakan bukti terpecahnya persatuan umat Islam Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan umat.

B. Saran-saran.

1. Berdasarkan penyusunan yang dilakukan, menyarankan kepada politikus Islam, partai, dan aktivis pergerakan Islam, dalam menjalankan politik praktisnya, terutama merealisasikan tujuannya dan perjuangannya harus diingat kembali, bahwa persatuan dan kesatuan umat merupakan alat terpenting untuk mencapainya. Hal ini berimbas pada gagalnya sebuah tujuan dan perjuangan bahkan berakibat kepentingan dan kesejahteraan umat terabaikan.
2. Penyusun mengharapkan, untuk diadakannya kembali penelitian lebih lanjut tentang politik Islam Indonesia, khususnya terhadap partai politik Islam dalam Pemilu 1999.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Jakarta, 1984/1985.

B. Fiqh

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Yathibi*, cet.I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktek politik Islam di Indonesia* cet. ke-1, Jakarta: Paramadina, 1998.

Huwyadi, Fahmi, *Demokrasi, Oposisi dan Masyarakat Madani., Isu-Isu Besar Politik Islam*, terj. oleh Muhammad Abdul Ghofar E.M., cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1996.

Maududi, Abu A'la al-, *Khilafah dan Kerajaan*, cet. ke-1 Bandung: Mizan, 1984.

Qardhawy, Yusuf, Al-, *Fiqh Daulauh dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Sunnah*, terj. oleh Kathur Suhardi, cet. ke-3, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.

Rais, Muhammad Dhaidudin, *Teori Politik Islam*, cet. ke-1, terj oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Jakarta: Gema Insani 2001.

Sjazali, Munawir, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi ke-5 Jakarta: UI Press, tahun 1993.

Thaba, Abdul Aziz, *Islam Dan Negara Dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani, 1996.

Zullum, Abdul Qodim, *Sistem Pemerintahan Islam*, cet. ke-3, Bangil-Jatim: Al-Izzah, 2002.

C. Lain-lain

Affifudin, Ahmad, *Sistem Pemerintahan dalam Pandangan Bulan Bintang*. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2002.

- Amal, Ichsanul (ed), *Teori-Teori Partai Politik* ,edisi revisi cet. ke-2
Yogyakarta:PT Tiara 1993.
- Amir, Zainal Abidin, *Peta Politik Islam Pasca-Soeharto*, cet. ke-1, (Jakarta:
Pustaka LP3ES, 2003)
- Arisandi, *Kegagalan Politik Islam (tela'ah terhadap Partai Politik Masyumi)*,
Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta 2004.
- Benda, Harry j., *Bulan Sabit dan Matahari Terbit pada masa pendudukan Jepang*,
dialih bahasa oleh Daniel Dhakidae, cet. 1, Jakarta: PT. Dunia Pustaka
Jaya, 1985.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* , cet. ke-4, Jakarta: PT. Gramedia
Pustaka, 1993.
- Brunessen, Martin Van, *NU, Tradisi, Relasi-relasi Kuasa: Pencarian Wacana
Baru*, terj. Farid Wajidi, cet. 1.Jogjakarta: LKIS, 1994
- Cipto, Bambang, *Partai, Kekuasaan dan Militerisme*, cet. Ke-1, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2000.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Vol. V, Jakarta: Ichtiar
Baru Van House, 1996.
- Daminik, Ali Said, *Fenomena Partai Keadilan*, cet. II, Jakarta: Teraju 2003
- Departemen Dokumentasi,DPP PBB, *Sekjen Partai Bulan Bintang*, Jakarta:DPP
PBB, tt.
- Echols, John M, *An English-Indonesia Dictionary*, cet ke-2, Jakarta: PT
Gramedia, 1995.
- Forrester, Geoff (ed), *Indonesia Pasca Soeharto*, cet 1, tej. Abusamah Hamid dan
Ismi Silvia, (Yogyakarta: Teraju Press, 2002).
- Fatah, Eep Saifullah, *Zaman Kesempatan: Agenda-Agenda Besar Demokrasi
Pasca Orde Baru*, cet ke-1 Bandung:Mizan, 2000.
- Greg Fealy dan Hernhard Platzdasch, "The Masyumi Legacy: Beetween Islamist
Idealism And Political Exigency", *Studia Islamia*, Vol.12:1, Januari
2005.
- Greetz, Clifford, *Santri, Abangan Dan Priyayi Dalam Masyarakat Jawa*, cet. ke-1
Jakarta: Pustaka Jaya, 1981.

- Haris, Syamsudin, *PPP dan Politik Orde Baru*, cet 1, Jakarta:Grafindo, 1991
- Harjono, Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa, Menoleh Kebelakang Menatap Masa Depan*, cet. ke1, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- _____, M. Natsir: *Sumbangan Dan Pemikiran Untuk Indonesia*, cet.5, Jakarta: Media Dakwah, 1995.
- Hornby, As., *Oxford Advenced Learner's Dictionary of Current English*, edisi ke-4, Oxford University Press, 1989.
- Huda, Miftahul, *Ikhwanul Muhammadiyah, Benturan Ideologi Dan Kaderisasi Dalam Muhammadiyah*, cet-1, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah bekerja sama dengan Kibar Press. 2000.
- Karim, Rusli, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia, Sebuah Potret Pasang Surut*, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Perss, 1983.
- Lidle, R. William, *Pemilu-Pemilu Orde Baru, Pasang Surut Kekuasaan Politik*, cet. ke-2 Jakarta: LP3ES,1994.
- Mahendra, Yusril Ihza, *Modernis Dan Fundamentalisme Dalam Politik Islam , Perbandingan Partai Masyumi (Indonesia) Dan Partai Jam^A'at-I-Isl^Ami (Pakistan)*, terj. Mun'im A. Sirry, cet-1 Jakarta, Paramadina, 1999.
- Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Politik di Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin*, cet. ke-1, Yogyakarta: IAIN Su-Ka Press, 1998.
- _____, *Islam Dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)* cet. ke-1 Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- _____, *Islam dan Masalah Kenegaraan: studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante*, Jakarta: LP3ES, 1996.
- Mintz, Jean s., *Muhammad, Marx, Marhaein. Akar Sosialisme Indonesia*, cet ke-1 terj. Zulhimiyasari, Yogyakarta: Pustaka pelajar 2002.
- Moleong, Lexi. J., *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, cet ke-7 (Bandung: Rosida Karya, 2002).
- Mulkhan, Abdul Munir, *Ideologi Gerakan Dakwah, Episode Kehidupan M. Natsir dan Azhar Basyir*, cet. ke-1, Yogyakarta: Sipress, 1996.
- Mu'nim, Abdul D Z (ed) *IslamDi Tengah Arus Transisi* cet ke-1 Jakarta: Kompas 2000.

- Noer, Deliar, *Gerakan Moderen Islam di Indonesia 1900-1942*, cet. ke-4 Jakarta: Grafiti Press 1988.
- _____, *Partai Islam di Pentas Nasional*, cet ke-1, Jakarta: Grafiti Perss, 1987.
- Prasetyo, Eko, *Astagfirullah: Islam Jangan Dijual*, cet-1 Yogyakarta: Resist Book, 2007.
- Romli, Lili, *Islam Yes Partai Islam Yes, Sejarah Perkembangan Partai-Partai Islam Di Indonesia*, cet. ke-1, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Ridwan, M, *Sikap partai Politik Masyumi Pada masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960)*), Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2001.
- Salim, Peter, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, cet ke-4, Jakarta: Modern English Press. 1991.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia, *30 Tahun Indonesia Merdeka*, Jilid I, Jakarta: PT. Citra Lamtoro Gung Persada 1988.
- Suhelmi, Ahmad, *Polemik Negara Islam "Soekarno Versus Natsir"*, cet. ke-1 Jakarta: Teraju, 2002.
- Suryanegara, Ahmad Mansur, *Menemknan Sejarah Wacana Pergerakan Islam Di Indonesia*, cet. ke- 3, Bandung: Mizan 1996.
- Syamsuri, *Politik Islam Anti Komunis, Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*. Cet. ke-3, Yogyakarta: Syafiria Insania Press bekerjasama dengan Magister Studi Islam UII.
- Thoha, Idris (ed), *Pergulatan Partai Politik Indonesia*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2004.
- Umat*, No.47,Th.ke-III, 15 Juni 1998
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Partai Politik, pasal 1 ayat (1)
- Yatim, Badri, *Sejarah Peradaban Islam, Dirasah Islamiyah II*, cet. ke-2, Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, 1995.

[http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu_99 /7 pku.htm](http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Indonesian_Elections/Indo-pemilu_99/pku.htm), akses Sabtu, 6 Maret 1999

Sabili No.5, Th.ke-VI, 16 September 1998

Sabili, No.23, Th. Ke-VI 2 Juni 1999

Sabili, No. 22, Th. Ke-IV 19 Mei 1999

Lampiran I

TERJEMAHAN

No	Bab	FN	HL M	TERJEMAHAN
01	II	16	31	Menetapkan hukum itu adalah hak Allah (Q.s. Al-An'am:57)
02	II	20	29	Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru pada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar (Q.s. Ali Imran 104)
03	II	18	32	Jihad yang paling utama adalah menyampaikan kebenaran pada pemimpin yang dhalim."

BIOGRAFI TOKOH/ULAMA

YUSRIL IHZA MAHENDRA

lahir di Belitung pada 5 Februari 1956) adalah seorang politikus Indonesia. Ia adalah Menteri Sekretaris Negara Indonesia pada periode 20 Oktober 2004-8 Mei 2007. Di bidang politik, dari tahun 1998 hingga 2005 ia menjabat sebagai Ketua Umum Partai Bulan Bintang. Mahendra telah tiga kali menempati jabatan sebagai seorang menteri dalam kabinet pemerintahan Indonesia, yaitu Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (26 Agustus 2000-7 Februari 2001), Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Kabinet Gotong Royong (Agustus 2001-2004) dan terakhir Menteri Sekretaris Negara Kabinet Indonesia Bersatu (20 Oktober 2004-2007). Pendirian S-1 jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI diselesaikan pada 1983 dan jurusan Filsafat Fakultas Sastra UI (1982). Sedang, pendidikan S2-nya dari *Graduate School of Humanities and Social Science*, Universitas Punjab (India) pada 1984. Sementara, S-3 diperoleh dari *Institute of Post Graduate Studies*, Universitas Sains Malaysia (1993). Beliau juga sebagai Staf pengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ), Staf pengajar di Akademi Ilmu Pemasaran, Depke (1983), Staf pengajar di Program Pascasarjana UI dan UMJ serta pengajar Fakultas Hukum UI. Dalam organisasi sebagai Wakil Ketua Badan Komunikasi Pemuda Masjid Indonesia (1981-1982), Anggota DPP Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1996-2000), Ketua pengkajian hukum merangkap wakil ketua Dewan Pakar ICMI wilayah DKI Jakarta (1996-2000).

M. NATSIR

M. Natsir yang bergelar Datuk Sinaro Panjang, terlahir di jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 dari seorang wanita yang bernama Khadijah. Ayahnya bernama Mohammad Isdris Sutan Saripado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi guru tulis pada kantor kontroler di Maninjau. Pada tahun 1918, ia dipindahkan dari Alahan Panjang ke Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) sebagai sipir (penjaga tahanan). M. Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Yukinan, Rubiah dan Yohanusan.

Ditempat kelahirannya itu, ia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Ia menempun pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama dan tekun pada beberapa alim ulama. Ia sekolah partikelir HIS (Holland Inlandische school) Adabiah di Padang. Kemudian dipindahkan ke HIS pemerintah di Solok oleh ayahnya yang telah beberapa bulan sekolah di Padang. Ia menamatkan HIS pada tahun 1923 antara

tahun 1916 hingga tahun 1923, ia belajar HIS dan Madrasah Diniyah di Solok dan Padang. M. Natsir masuk MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderswijs*) di Padang dan meneruskan pendidikan formalnya ke AMS(*Algemene Middlebare School*) Afdeling Adi Bandung dan meraih Gelar *Meester in de Rechten* (MR) dan di kota ini, ia bertemu dengan tokoh radikal Ahmad Hasan Pendiri Persis, yang diakuinya sangat memengaruhi alam pikirannya. Setelah belajar di AMS, M. Natsir tidak melanjutkan kuliah, melainkan mengajar di salah satu di MULO di Bandung dan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (Pendis), suatu pendidikan modern yang mengkombinasikan kurikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. Pada masa mudanya ia masuk anggota Pandu *National Islamietische Pavinderij*, sejenis pramuka sekarang, dari perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (JIB) Padang.

Pada tahun 1938, M. Natsir mulai aktif di bidang politik, mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Beliau menjabat ketua PII Bandung pada tahun 1940 hingga tahun 1942. pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) ikut dalam MIAI dan kemudian berubah menjadi Masyumi, selanjutnya mengantarkan beliau menjadi ketuanya hingga partai tersebut dibubarkan. M. Natsir dikenal sebagai birokrat, politisi, dan juga sebagai da'i ternama. Sebagai birokrat, ia sebagai menteri penerangan dalam Kabinet Syahrir dan Perdana Menteri pertama pada masa pemerintahan Soekarno. Sebagai politisi, ia menduduki jabatan puncak partai Masyumi dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Adapun sebagai da'i, M. Natsir menjadi wakil Presiden *Muktamar Alam Islam* sekaligus sebagai tokoh puncak *Rabithah Alam Islam*, serta menjadi ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1967-1993). M. Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993/14 Sya'ban 1413 H, di Rumah Sakit Ciptomangunkusumo, Jakarta, dalam usia 85 tahun.

AHMAD SYAFII MA'ARIF

Ahmad Syafii Ma'arif, lahir tanggal 31 Mei 1935 di Sumpur Kudus, Sumatra Barat, adalah dosen F PIPS IKIP, IAIN Sunan Kalijaga dan Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Pernah belajar di Madrasah Mualimin Muhammadiyah Lindu (1935) dan Madrasah Mualimin Muhammadiyah Yogyakarta (1956), kuliah di FKIP Universitas Cokroaminoto Surakarta sampai Sarjana Muda (1964), Tamat FKIS IKIP Yogyakarta (1968), belajar sejarah pada *Notheren Illionis University* (1973) memperoleh gelar M.A dalam ilmu sejarah pada Ohio University Athen, Amerika Serikat (1980). Gelar Ph.D. dalam bidang pemikiran Islam diperolehnya dari *University of Chicago*, Amerika Serikat (Desember 1982), dengan disertasi berjudul *Islam as Reflected In the Constituent Assembly Debates in Indonesia*. Beliau seorang penulis dalam beberapa jurnal surat kabar di dalam dan luar negeri. Terakhir beliau adalah seorang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah (2005).

CURRICULUM VITAE

Nama : Kholil Fathul Umam
Kelamin : Laki-laki
NIM : 03370270
TTL : Tanjung Balai, 7 Maret 1984

Riwayat Pendidikan :

- | | |
|---|------------|
| 1. SD Negeri 039 | 1992-1998 |
| 2. SLTP 4 Kundur | 1998-2000 |
| 3. SMU 1 Kundur Utara | 2000-2003 |
| 4. Fakultas Syari'ah UIN Su-Ka Yogyakarta | 2003-..... |

Identitas Orang Tua:

Nama Bapak : Mohammad Ali Bisri
Pekerjaan : Petani
Nama Ibu : Humaidah
Pekerjaan : Petani
Alamat Orang Tua :Jln. Hang Tuah KM. 4 RT 05/07 Urung, Kundur Utara, Tanjung
Balai